

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2007.
....., *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
....., *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Amirin, Tatang M, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta : CV. Rajawali, 1986.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada, 2004.
- Anshori, Abdul Ghofur, , *Lembaga Kenotariatan Indobesia-Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta : UII Press, 2009.
- Asshidiqie, Jimly dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Budiono, Herlian, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2002.
- Hadjon, Philipus M, *Tentang Wewenang*, Surabaya : Makalah Universitas Airlangga.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013.
- Kohar, A, *Notaris dalam Praktek Umum*, Bandung : Penerbit alumni, 1983.
- Lumban Tobing, G.H.S., *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta : Erlangga, 1999.
- Materi pramagang I tentang kenotariatan, Pada tanggal 20 April 2015 di Kantor Notaris Rio Kustianto Wironegoro.
- Mulyoto, *Perjanjian (teknik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai)*, Yogyakarta : Cakrawala Media, 2012.

- Nico, *Tanggung Jawab Notaris selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta : Center For Documentation and Studies of Business Law (CDSBL), 2003.
- Notodisoerjo, R.Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 1993.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Sjafrizal, *Ekonomi Regional*, Padang: Niaga Swadaya, 2008
- Sjaifurrahman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2011.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers, 2001.
-, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI Press), 1986.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2003.
- Sumardjono, Maria S.W., *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2014.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 1996.
- Syafrudin, Ateng, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Bandung : Jurnaln Pro Justisia Edisi IV Universitas Parahyangan, 2002.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Tobing, G.H.S. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.
- Triwulan, Titik dan H. Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Staatsblad* tahun 1847 Nomor 23 tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* (BW)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-06.Ah.02.10 Tahun 2009 Tentang Sekretariat Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) ditetapkan di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005.

C. KARYA ILMIAH

Amrullah, Hidayat, “Perlindungan Hukum terhadap Notaris sebagai Pemegang Protokol yang Meninggal Dunia”, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010.

Hariyanto, Febrina, “Peralihan Kewenangan Pengelolaan Protokol Notaris setelah berlakunta Undang-Undang jabatan Notaris”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010.

Database Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sumatera Barat, jalan S Parman Nomor 256 Padang 25133.

D. INTERNET

Sinaga, Herianto, “Tanggung Jawab Werda Notaris terhadap akta yang dibuatnya”, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/44330/6/Cover.pdf>, diakses tanggal 8 September 2015

Yuana, Ima Erлие, “Tanggungjawab Notaris setelah berakhir masa jabatannya terhadap akta yang dibuatnya ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, <http://core.ac.uk/download/pdf/11723058.pdf>, diakses tanggal 8 September 2015.

<Http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt532c49f3cbb01/notaris-bingung-dimana-harus-menyimpan-protokol-notaris>, diakses tanggal 10 April 2016

Pungus, Sonny, Teori Pertanggungjawaban, available from URL : <http://Sonnytobelo.blogspot.com/2010/12/teoripertanggungjawaban.html>, 2010

<http://sumbar.antarane.ws.com/berita/149259/padang-ingin-kembalikan-kejayaan-indonesia-sebagai-penghasil-rempah.html>

